



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun  
2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di  
Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Penertiban  
Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan  
Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Administrasi Publik

Oleh

Aulia Pramesty Putri Sujarwo

2012310103

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun  
2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di  
Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Penertiban  
Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan  
Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).**

Skripsi

Oleh

Aulia Pramesty Putri Sujarwo

2012310103

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun  
2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di  
Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Penertiban  
Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan  
Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).**

Skripsi

Oleh

Aulia Pramesty Putri Sujarwo

2012310103

Bandung

2017

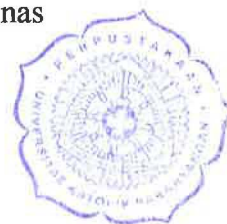
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Aulia Pramesty Putri Sujarwo  
Nomor Pokok : 2012310103  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 11 Agustus 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**



**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D.

: 


**Sekretaris**

Kristian Widya Wicaksono S.Sos., M.Si

: 

**Anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



### Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Pramesty Putri Sujarwo

NPM : 2012310103

Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung  
Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  
Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan  
(Studi Kasus Penanganan Penertiban Parkir Liar di  
Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan  
Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota  
Bandung).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Agustus 2017



Aulia Pramesty Putri Sujarwo

## ABSTRAK

Nama : Aulia Pramesty Putri Sujarwo  
NPM : 2012310103  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).

---

Di Kota Bandung, penanganan mengenai penertiban parkir liar dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Namun, sesuai dengan data yang dirilis oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung diketahui bahwa jumlah kasus parkir liar di Kota Bandung masih terbilang cukup tinggi.

Fokus penelitian ini adalah untuk melakukan studi pencapaian keberhasilan penanganan kasus penertiban parkir liar di kota Bandung konteks Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus yang berfokus pada kasus penanganan penertiban parkir liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mengacu pada hal tersebut, maka jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan analisis data spesifik pada kasus penanganan parkir liar (*purposive analysis*) yang diintegrasikan dengan teknik analisis data kualitatif data menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 belum berhasil. Hal ini dikarenakan hubungan antara kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung dengan tujuan yang diinginkan yaitu terciptanya parker yang tertib di Kota Bandung tidak langsung. Selain itu, tahapan penindakan penertiban parkir liar terlalu rumit sehingga staf tidak dapat memenuhinya.

Kata kunci: Keberhasilan Implementasi, Parkir Liar

## ABSTRACT

Name : Aulia Pramesty Putri Sujarwo

NPM : 2012310103

Title : *Implementation of Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 About The Implemetation of Transportation and Retribution in the Dinas Perhubungan Kota Bandung (Case Study Curbing Illegal Parking in Bandung by Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).*

---

*Illegal parking in Bandung City is handled by Dinas Perhubungan as mentioned in Peraturan Daerah Kota Bandung Number 16 Year 2012. However, according to the data which has been released by Dinas perhubungan Kota Bandung shows that the number of Illegal Parking in Bandung City is quite high.*

*Focus of this reserach is to examine the successful achivement of problem handling in case of Illegal Parking as a part of The Impelementation of Peraturan Daerah Kota Bandung Number 16 Year 2012. This research is using a qualittive approach which focusing on the case of Illegal Parking handled by Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Regarding to that reserach focus, the type of case study which choosed in this research is intrinsic case study. On the other hand, I used embedded analysis which integrate whit qualitative data analysis apparoach that introduced by Miles and Huberman.*

*The result of this research shows that problem handling in case of Illegal Parking in Kota Bandung which conducted by Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung in context of Impelementation of Peraturan Daerah Kota Bandung Number 16 Year 2012 is categorized as not successfull. The reason that Illegal Parking is not handled well by Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung are the relationship between the policy of oredering illegal parking with the desired goal of creating an orderly parking in the city of Bandung indirectly. Also the elements needed in the implementation of the policy are too complicated and too long so that the implementation difficulties in fulfilling the element.*

*Keywords: Successfull Implementation, Illegal Parking*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Studi Kasus Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis terkait dengan administrasi publik di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya Joko Sujarwo dan Yuyu Sri Rahayu, serta adik saya M. Akbar Ibnu Farhan Putra Sujarwo yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan kasih sayang tiada henti kepada penulis. Tak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih



untuk dosen pembimbing peneliti Kristian Widya Wicaksono, S. Sos, M. Si. yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Tutik Rachmawati, Ph. D dan Kristian Widya Wicaksono, S. Sos, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
- Jajaran dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
- Drs. Yosep Heryansyah dan segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- Untuk Keluarga Besar Djasmi Sadiyo, Dudung Abdurrakhman, dan Dimin Sadiyo.
- Teman-teman mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Unpar Angkatan 2012.
- Serta semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Bandung, 2 Agustus 2017

Penulis,

Aulia Pramesty Putri Sujarwo

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Kebijakan Publik .....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.3 Fokus Implementasi .....	13
2.3.1 <i>Logic the policy</i> .....	13
2.3.2 <i>Incentive of adaption phase</i> .....	14
2.3.3 <i>Essential elements</i> .....	15
2.3.4 <i>Availability of implementer</i> .....	16
2.4 Parkir .....	17
2.5 Model Penelitian .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	20
3.1 Metode Penelitian .....	20
3.2 Model Penelitian .....	22
3.3 Peran Peneliti .....	24
3.4 Lokasi Penelitian .....	25
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	26
3.5.1 <i>Sumber Data</i> .....	26
3.5.2 <i>Prosedur Pengumpulan Data</i> .....	27
3.6 Analisis Data .....	29
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan .....	32
3.8 Operasional Variabel .....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM .....	37
4.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Bandung .....	37
4.1.1 <i>Tugas Pokok dan Fungsi</i> .....	37
4.1.3 <i>Struktur Organisasi Dinas Perhubungan</i> .....	39

<b>BAB V IMPLEMENTASI PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA</b>	
<b>BANDUNG</b> .....	41
5.1 Logic of The Policy .....	43
5.2 Incentive of Adaption Phase.....	52
5.3 Essential Elements.....	57
5.4 Availability of Implementer .....	63
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Zona Parkir Umum Kota Bandung .....	1
Tabel 1.2 Daftar Pelanggar Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 .....	2
Tabel 1.3 Hubungan Indikasi Masalah dengan Dimensi Teori.....	7
Tabel 1.4 Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan Dibidang Perhubungan.....	39
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung Berdasarkan Pangkat atau Golongan .....	41
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan .....	41
Tabel 5.1 Kesesuaian Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi penertiban parkir liar dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 .....	45
Tabel 5.1.1 Data Pelanggaran Yang Melakukan Parkir Liar di Kota Bandung .....	48
Tabel 5.2 Sanksi yang diberikan kepada Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Pehubungan jika melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 .....	54
Tabel 5.3 Ketersediaan sumberdaya yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 .....	58

Tabel 5.4 Kemampuan Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan penertiban parkir liar.....	65
Tabel 5.5 Tabel Kesimpulan .....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5.1 Staf Apel Pagi .....	51
Gambar 5.2 Staf Melakukan Pemasangan Gembok Ban .....	62
Gambar 5.3 SOP Parkir Liar .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data penertiban parkir liar di Kota Bandung 2012-2014

Lampiran 2 Kartu Bimbingan

Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang  
Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan

Lampiran 4 Panduan Wawancara





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan meningkatnya volume kendaraan di Kota Bandung maka penyediaan fasilitas parkir pun harus setara dengan jumlah volume kendaraan. Fasilitas parkir sangat dibutuhkan bagi semua kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan, dimana kendaraan tidak selamanya bergerak. Namun pada kenyataannya jumlah lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah volume kendaraan yang ada di lapangan. Dari data yang ada terdapat 400 ruas jalan dan 100 di gedung yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi lahan parkir yang resmi. Dengan kondisi yang seperti ini maka banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan yang jelas-jelas bukan tempat untuk memarkirkan kendaraan.

**TABEL 1.1**  
Zona Parkir Umum Kota Bandung<sup>1</sup>

WILAYAH	BANYAKNYA LOKASI PARKIR
Zona Pusat Kota	67
Zona Penyangga	146
Zona Pinggiran	23
Jumlah	236

Berdasarkan data pelanggaran yang melakukan parkir liar di Kota Bandung, maka dapat dikatakan bahwa lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah kurang sehingga menimbulkan adanya masyarakat yang menggunakan pinggir jalan

---

<sup>1</sup> Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015

sebagai lahan parkir. Lahan parkir ini merupakan lahan parkir yang illegal sehingga dapat juga disebut dengan parkir liar. Dengan adanya parkir liar ini mengakibatkan bertumbuhnya premanisme yang meresahkan masyarakat, selain itu juga kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan jalan raya sangat terganggu. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bandung membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan penertiban parkir liar yang dilaksanakan atau diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

**TABEL 1.2**

Data Pelanggar Tahun 2013, 2014, dan 2015<sup>2</sup>

REKAPITULASI PELANGGAR KENDARAAN RODA 2 DAN RODA 4 DALAM RANGKA PENERTIBAN PARKIR DI KOTA BANDUNG FEBRUARI 2013 - DESEMBER 2013					REKAPITULASI PELANGGAR KENDARAAN RODA 2 DAN RODA 4 DALAM RANGKA PENERTIBAN PARKIR DI KOTA BANDUNG JANUARI 2014 - DESEMBER 2014						
NO	BULAN	JUMLAH PELANGGAR			KET	NO	BULAN	JUMLAH PELANGGAR			KET
		RODA 4 (MOBIL)	RODA 2 (MOTOR)	R4 + R2				MOBIL (R4)	MOTOR (R2)	R4 + R2	
1	FEBRUARI	260	376	636		1	JANUARI	107	32	139	
2	MARET	169	247	416		2	FEBRUARI	146	1	147	
3	APRIL	96	173	269		3	MARET	199	50	249	
4	MEI	85	224	309		4	APRIL	222	42	264	
5	JUNI	96	188	284		5	MEI	239	101	340	
6	JULI	-	17	17	PLOTTING	6	JUNI	150	48	198	
7	AGUSTUS	3	8	11	PLOTTING	7	JULI	57	81	138	
8	SEPTEMBER	51	101	152		8	AGUSTUS	290	78	368	
9	OKTOBER	62	179	241		9	SEPTEMBER	318	31	349	
10	NOVEMBER	1	39	40	PLOTTING	10	OKTOBER	275	54	329	
11	DESEMBER	131	111	242		11	NOVEMBER	252	106	358	
	<b>JUMLAH</b>	<b>954</b>	<b>1663</b>	<b>2617</b>		12	DESEMBER	122	30	152	
						<b>JUMLAH</b>	<b>2377</b>	<b>654</b>	<b>3031</b>		

REKAPITULASI PELANGGAR KENDARAAN RODA 2 DAN RODA 4 DALAM RANGKA PENERTIBAN PARKIR DI KOTA BANDUNG JANUARI 2015 - DESEMBER 2015					
NO	BULAN	JUMLAH PELANGGAR			KET
		BAP (R4 + R2)	PERNYATAAN	KTP/STNK BELUM DIAMBIL	
1	JANUARI	0	0		
2	FEBRUARI	0	7		
3	MARET	132	95		
4	APRIL	87	125		
5	MEI	104	219		
6	JUNI	0	118		
7	JULI	5	0		
8	AGUSTUS	0	5		
9	SEPTEMBER	59	72		
10	OKTOBER	26	110		
11	NOVEMBER	79	71		
12	DESEMBER	19	3		
	<b>JUMLAH</b>	<b>511</b>	<b>825</b>	<b>298</b>	

<sup>2</sup> Sumber data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung khususnya Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengimplementasikan kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung ini dimulai pada tahun 2012 dan masih berjalan hingga sekarang. Namun setelah selama kurang lebih 5 tahun berjalan, tingkat masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir liar terbilang masih cukup tinggi. Jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir liar di Kota Bandung masih diatas angka 500 buah kendaraan. Dapat dilihat dari data tabel diatas bahwa pelanggar yang melakukan kegiatan parkir liar tahun 2013 sebanyak 2.617 buah kendaraan, termasuk kendaraan roda empat dan roda dua. Kemudian tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2014, pelanggar yang terkena penindakan penertiban parkir liar bertambah menjadi 3.031 buah. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal kegiatan penertiban parkir liar ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2015 data pelanggar kembali turun yaitu sebanyak 825 buah kendaraan. Hal ini menjadi titik terendah dimana jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran mengalami penurunan. Namun, jumlah pelanggar yang melakukan penertiban parkir liar di Kota Bandung masih cukup tinggi.

Hal ini juga tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Pasal 49 Ayat 2 yang menyatakan, pemindahan kendaraan bermotor dilakukan pada kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga tertuang pada pasal 50 ayat 1 poin d, e, dan f yang menyatakan, jika pemindahan

kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian kendaraan. Terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan.

Namun, pada kenyataan di lapangan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat mengatasi masalah parkir liar di Kota Bandung. Setelah kebijakan penertiban parkir liar ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, jumlah pelanggar yang melakukan penertiban parkir liar terbilang masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 dimana telah disebutkan bahwa tingkat jumlah pelanggar Kota Bandung masih diatas 500 orang. Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi lapangan:

- Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih kurang karena seharusnya dilihat dari prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dishub dilakukan setiap hari ke seluruh jalanan di Kota Bandung, namun kenyataannya tidak semua jalanan Kota Bandung diawasi setiap hari karena terhambat oleh jalanan, jarak tempuh dan juga jumlah staf yang dikerahkan, jumlah staf yang dikerahkan adalah 22 orang.<sup>3</sup>
- Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar dengan parkir di sembarang tempat dengan cara penempelan stiker dan juga pengembokan ban, namun pada kenyataannya terdapat beberapa

---

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil wawancara staf Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 10.00 WIB

kendaraan yang tidak di gembok bannya namun ditempelkan stiker, namun ada juga kendaraan yang ditempelkan stiker namun tidak diberikan gembok pada bannya dikarenakan faktor kurangnya jumlah gembok ban mobil dan juga stiker.<sup>4</sup>

- Kurangnya edukasi terhadap masyarakat karena banyak masyarakat yang hanya mengetahui zona dilarang parkir jika terdapat rambu-rambu di daerah tersebut, padahal sebenarnya tidak semua zona dilarang parkir diberikan rambu-rambu.<sup>5</sup>
- Staf merasa penindakan gembok pada ban akan menghasilkan kerja yang ekstra untuk mereka karena harus melakukan pemasangan (jika melanggar) dan juga melakukan pelepasan (jika sudah membayar denda), sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan penempelan stiker dibandingkan dengan penggembokan ban.<sup>6</sup>
- Kurangnya edukasi terhadap masyarakat karena banyak masyarakat yang hanya mengetahui zona dilarang parkir jika terdapat rambu-rambu di daerah tersebut, padahal sebenarnya tidak semua zona dilarang parkir diberikan rambu-rambu.<sup>7</sup>

Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Weimer dan Vining:

---

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil observasi lapangan di Jalan Otto Iskandar Dinata pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 13.30 WIB

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara staf Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> *ibid*

*We consider four general factors that are important for succesful implementation: the logic of the policy, the incentives to implement (does the adoption phase build in incentives for implementation?), the nature of the cooperation required (who has essential elements?), and the availability of skilled people to manage the implementation (particularly: is there “fixer”?). An awareness of these four factors is a major step toward designing policies that can be successfully implemented.<sup>8</sup>*

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh hukum dan standar yang jelas yang nantinya menjadi pedoman bagi para implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Tahapan-tahapan yang menjadi elemen penghubung antara kebijakan dengan tujuan haruslah singkat dan padat, agar implementer lebih mudah dalam menerapkan seluruh tahapan dan juga akan lebih mudah dalam pengontrolan. Selanjutnya, implementator harus memiliki keahlian dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya kewenangan yang dimiliki oleh implementer agar implementer dapat secara leluasa dalam mengimplementasikan kebijakan. Semua hal tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

**TABEL 1.3**

Hubungan Indikasi Masalah Dengan Dimensi Teori

Dimensi	Indikasi Masalah
<i>Logic of The Policy</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat kendaraan yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan parkir di zona dilarang parkir, khususnya di tepi jalan. Hal ini membuktikan bahwa belum efektifnya kebijakan</li> </ul>

<sup>8</sup> David L. Weimer and Aidan R. Vining, *Policy Analysis: Concepts and Practice*, (New Jersey: Uppersaddle, 2010), 287

	<p>penertiban parkir liar ini. Dengan adanya kebijakan penertiban parkir liar akan menciptakan kondisi atau suasana tertib di zona parkir khususnya tepi jalan. Namun pada kenyataannya suasana yang berada di Kota Bandung masih jauh dari suasana tertib. Hal ini merupakan termasuk ke dalam <i>logic of the policy</i>, dimana kebijakan penertiban parkir liar belum secara langsung memberikan dampak pada kondisi zona parkir khususnya di tepi jalan.</p>
<p><i>Essential Elements</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahapan yang cukup rumit dimana ketika melakukan pengembokan, Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan harus kembali lagi ke tempat kendaraan yang di gembok itu berada untuk dilakukan pelepasan gembok. Hal ini merupakan termasuk ke dalam <i>essential elements</i>, dimana Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung kesulitan dalam memenuhi tahapan penertiban parkir liar di Kota Bandung sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif.</li> </ul>

Adanya penelitian yang dilakukan terhadap masalah ini diharapkan dapat memberi solusi bagi pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung di dalam penertiban parkir liar.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung).*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah:

Bagaimana pencapaian keberhasilan penanganan kasus parkir liar di Kota Bandung dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan dari dimensi *logic of the policy*, *incentive of adaption phase*, *essential elements*, *availability of implementer*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pencapaian keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan dari dimensi *logic of the policy*, *incentive of adaption phase*, *essential elements*, *availability of implementer*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai pencapaian keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan oleh Bidang



Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan dari dimensi *logic of the policy, incentive of adaption phase, essential elements, availability of implementer*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disajikan dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 1.4**  
Sistematika Penulisan Skripsi

Bab	Judul Bab	Deskripsi Isi Bab
Bab 1	Pendahuluan	Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
Bab 2	Tinjauan Pustaka	Bab ini menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan publik, fokus implementasi, dan teori Weimer dan Vining yang berfokus pada keberhasilan dan kegagalan kebijakan.
Bab 3	Metode Penelitian	Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan operasionalisasi variabel.
Bab 4	Gambaran Umum	Bab ini menjelaskan mengenai profil Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Bab 5	Analisis dan Interpretasi Data	Bab ini menjelaskan mengenai analisis data berdasarkan teori Weimer dan Vining berfokus pada keberhasilan dan kegagalan kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga menginterpretasikan data yang sudah dianalisis.
Bab 6	Kesimpulan dan Saran	Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi saran untuk keberhasilan dan kegagalan kebijakan terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 16 Tahun 2012.